

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Persero Melalui Kewenangan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dan Wakil Negara Dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Utilization of Good Corporate Governance in the Management of State-Owned Enterprises of Persero through the Authority of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders and State Representatives in State Assets Seperated Based on Legal Theory of Public Finance

Sitinjak, Punia Nathania, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555693&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN yang dilakukan melalui kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan wakil negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan dasar mengenai BUMN pada dasarnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN yang termasuk dalam koridor ranah hukum privat sering kali dipandang sebagai ranah hukum publik dan dikaitkan dengan keuangan negara. Peraturan yang sudah ada sebelumnya kerap dipahami dengan interpretasi yang berbeda sehingga menghambat kemajuan BUMN dalam berkembang secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengelolaan BUMN sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai RUPS dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penulis berpendapat bahwa Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti layaknya perusahaan swasta. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara eksplisit, norma tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk lebih bertindak profesional yang mampu meningkatkan daya saing dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN.

.....This thesis discusses the implementation of good corporate governance in BUMN which is carried out through the authority of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders and Representatives in State Assets Seperated. The basic provisions regarding BUMN are basically regulated in Law no. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several different interpretations of the authority of the Minister of BUMN in managing BUMN which are included in the corridor of the realm of private law which is often seen as the realm of public law and is associated with state finances. Pre-existing regulations are often understood with different interpretations, thus hampering the progress of BUMN in developing professionally. This research is a normative juridical research by means of library research which is conducted on primary and secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The

results obtained by the author through this research are knowing that the management of BUMN should be carried out by the Minister of BUMN as a GMS by applying the principles of good corporate governance. The author argues that the Minister of BUMN has the authority to manage BUMN as separated state assets like private companies. Based on Law No. 19 of 2003, the development and management of BUMN is no longer based on the APBN system, but is based on the principles of a healthy company. Explicitly, this norm encourages the government through the Ministry of BUMN to act more professionally.